



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi

Бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь төсвийн орлого
дээр нэмэгдэх хэмжээг 35.1% хэмээн тооцож
гэж байгаа бөгөөд үүнийг үндэслэл нь
дээрх үнийн өсөлт нь 1991 оны 12 сарын
сүүлчийн үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно.

Түлбэр:

Энэ үнийн өсөлт нь төсвийн орлого
дээр нэмэгдэх хэмжээг 35.1% хэмээн тооцож
гэж байгаа бөгөөд үүнийг үндэслэл нь
дээрх үнийн өсөлт нь 1991 оны 12 сарын
сүүлчийн үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно.

Бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь төсвийн орлого
дээр нэмэгдэх хэмжээг 35.1% хэмээн тооцож
гэж байгаа бөгөөд үүнийг үндэслэл нь
дээрх үнийн өсөлт нь 1991 оны 12 сарын
сүүлчийн үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно.

Түлбэр:

Бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт

Бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь төсвийн орлого
дээр нэмэгдэх хэмжээг 35.1% хэмээн тооцож
гэж байгаа бөгөөд үүнийг үндэслэл нь
дээрх үнийн өсөлт нь 1991 оны 12 сарын
сүүлчийн үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно.

Бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт

Бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь төсвийн орлого
дээр нэмэгдэх хэмжээг 35.1% хэмээн тооцож
гэж байгаа бөгөөд үүнийг үндэслэл нь
дээрх үнийн өсөлт нь 1991 оны 12 сарын
сүүлчийн үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно. 1992 оны 1 сарын 1-ний үнийн өсөлт
дээрх үнийн өсөлттэй тэнцүү гэж үзсэн
болно.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙН ӨСӨЛТ

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

dan beberapa lembaga lainnya. Pada tahun 1999, jumlah lembaga ini mencapai 1000 lembaga.

1. Lembaga Pendidikan. Jumlah lembaga pendidikan ini mencapai 1000 lembaga. Jumlah lembaga pendidikan ini mencapai 1000 lembaga.

2. Lembaga Penelitian. Jumlah lembaga penelitian ini mencapai 1000 lembaga. Jumlah lembaga penelitian ini mencapai 1000 lembaga.

3. Lembaga Pengabdian Masyarakat. Jumlah lembaga pengabdian masyarakat ini mencapai 1000 lembaga. Jumlah lembaga pengabdian masyarakat ini mencapai 1000 lembaga.

4. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jumlah lembaga pengembangan sumber daya manusia ini mencapai 1000 lembaga. Jumlah lembaga pengembangan sumber daya manusia ini mencapai 1000 lembaga.

5. Lembaga Pengembangan Teknologi. Jumlah lembaga pengembangan teknologi ini mencapai 1000 lembaga. Jumlah lembaga pengembangan teknologi ini mencapai 1000 lembaga.

6. Lembaga Pengembangan Seni dan Budaya. Jumlah lembaga pengembangan seni dan budaya ini mencapai 1000 lembaga. Jumlah lembaga pengembangan seni dan budaya ini mencapai 1000 lembaga.

7. Lembaga Pengembangan Olahraga. Jumlah lembaga pengembangan olahraga ini mencapai 1000 lembaga. Jumlah lembaga pengembangan olahraga ini mencapai 1000 lembaga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOKE BOLO

dan

KEPADA BOKE BOLO

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN DAERAH KABUPATEN BOKE BOLO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN YATA PERUSAHAAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOKE
BOLO

BAWA

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

Keputusan Daerah ini yang berlaku dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boke Bolo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai unsur pemerintahan tertinggi
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boke Bolo DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boke Bolo
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam rangka dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boke Bolo
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boke Bolo
7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boke Bolo

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
dan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolah Ragaan ;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 7

Bidang Kepemudaan terdiri atas ;

- a. Seksi Pembinaan Generasi Muda; dan
- b. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 8

Bidang Keolah Ragaan terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Keolah Ragaan; dan
- b. Seksi Organisasi Keolah Ragaan .

Pasal 9

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga ;dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan ;

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (4) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

изменения в области безопасности

(в) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

и обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(г) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(д) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

и обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(е) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(ж) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(з) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(и) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(к) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(л) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(м) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(н) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(о) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(п) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

(р) обеспечение того, чтобы безопасность не была поставлена под угрозу

Pasal 12

- (3) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (7) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

(3) Nach dem Ende der Verhandlung ist der
Besitz der Sache demjenigen zu übertragen,
der sie in der Verhandlung erworben hat.

(4) Wenn der Verkäufer die Sache in der
Verhandlung erworben hat, so ist der
Besitz der Sache dem Verkäufer zu übertragen.

(5) Wenn der Käufer die Sache in der
Verhandlung erworben hat, so ist der
Besitz der Sache dem Käufer zu übertragen.

(6) Wenn der Verkäufer die Sache in der
Verhandlung erworben hat, so ist der
Besitz der Sache dem Verkäufer zu übertragen.

§ 10

(1) Wenn der Verkäufer die Sache in der
Verhandlung erworben hat, so ist der
Besitz der Sache dem Verkäufer zu übertragen.

(2) Wenn der Käufer die Sache in der
Verhandlung erworben hat, so ist der
Besitz der Sache dem Käufer zu übertragen.

(3) Wenn der Verkäufer die Sache in der
Verhandlung erworben hat, so ist der
Besitz der Sache dem Verkäufer zu übertragen.

(4) Wenn der Käufer die Sache in der
Verhandlung erworben hat, so ist der
Besitz der Sache dem Käufer zu übertragen.

Pasal 15

- (3) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Page 12

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the results of the survey.

Page 13

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the results of the survey.

Page 14

2. The second part of the report deals with the specific results of the survey. It is divided into three sections: the first section deals with the results of the survey in the first part of the country, the second section deals with the results of the survey in the second part of the country, and the third section deals with the results of the survey in the third part of the country.

Page 15

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the results of the survey.

Page 16

2. The second part of the report deals with the specific results of the survey. It is divided into three sections: the first section deals with the results of the survey in the first part of the country, the second section deals with the results of the survey in the second part of the country, and the third section deals with the results of the survey in the third part of the country.

Page 17

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the results of the survey.

Page 18

2. The second part of the report deals with the specific results of the survey. It is divided into three sections: the first section deals with the results of the survey in the first part of the country, the second section deals with the results of the survey in the second part of the country, and the third section deals with the results of the survey in the third part of the country.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO

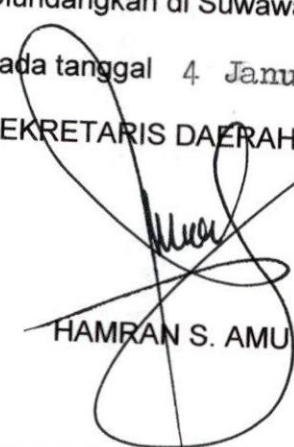


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D

• • • • •

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

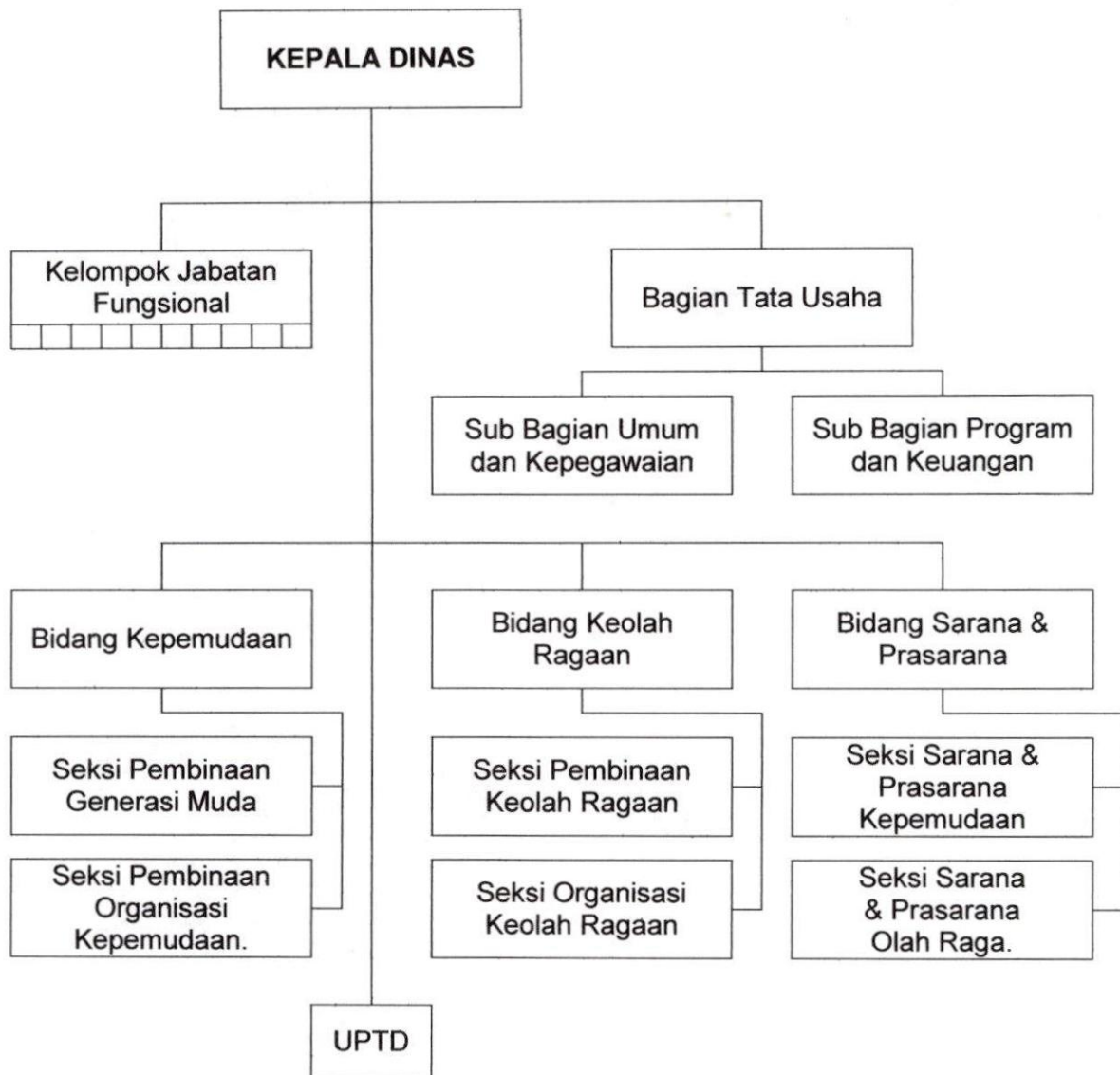
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR SERI D

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890